

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

**DOKUMEN RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latara Belakang

Tata kelola peemerintahan yang baik *Good Governance* dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna secara berkelanjutan. Sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang baik secara berjenjang maka setiap lembaga pemerintah wajib menyusun dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Dengan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah menyusun rencana kerja baik menengah dan tahunan sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD periode berkenan. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai dokumen perencanaan tahun 2024 merupakan penjabaran dari RENSTRA mengacu pada RPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 – 2026.

Rencana kerja tahun 2024 menterjemahkan prioritas-prioritas secara operasional sebagaimana tertuang dalam RPD dan karena fungsi badan perencanaan sebagai penunjang daerah dalam urusan perencanaan maka pada satu sisi sebagai perangkat daerah dan pada sisi lainnya mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah baik RENSTRA dan RENJA untuk capaian target indikator kinerja daerah secara operasional.

Rencana kerja tahun 2024 sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah memuat program / kegiatan prioritas dan penetapan pagu indikatif untuk sinergitas dan konsistensi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

-
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

-
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Aturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

-
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

-
- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

-
- Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 - 2020 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 002 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 002);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 0011);
29. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2018-2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 1);

31. Peraturan Bupati Sumba tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah disusun dengan maksud mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan dalam mewujudkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan daerah.

b) Tujuan

- 1) Menjabarkan rencana strategis dalam rencana operasional;
- 2) Mewujudkan konsistensi hirarki dokumen perencanaan strategis dan penganggaran tahunan perangkat daerah dalam pencapaian prioritas daerah;

-
- 3) Memastikan pengukuran kinerja fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - 4) Mewujudkan sinergitas dalam penerapan asas-asas perencanaan yang transparan, akuntabel dan terbuka oleh berbagai pemangku kepentingan.

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen

Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi rencana kerja tahun 2023 adalah pengukuran capaian target kinerja tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan perkiraan capaian rencana kerja tahun 2023, alokasi Belanja Daerah Urusan Wajib Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.302.694.007,- dengan belanja tidak langsung Rp. 1.600.931.867,- dan belanja langsung 2.160.699.007,- %, ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah tahun 2023 memuaskan. Uraian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah:

Capaian realisasi Tahun 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL DANA BTL & BELANJA LANSUNG	TOTAL REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
1	2	15	16	17	18
5	BELANJA	4.302.694.007	4.030.761.248	94%	94%
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.160.699.007	1.966.196.436	91%	91%
5.1.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.725.790.987	1.551.713.931	90%	90%
5.1.01.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.600.931.867	1.435.614.341	90%	90%

5.1.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.359.120	114.599.590	93%	93%
5.1.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	100%	100%
5.1.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.900.000	82.782.510	99%	99%
5.1.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.900.000	3.900.000	100%	100%
5.1.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	78.882.510	99%	99%
5.1.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.048.900	142.933.144	99%	99%
5.1.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000	20.605.024	95%	95%
5.1.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.448.900	122.328.120	100%	100%
5.1.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.959.120	188.766.851	91%	91%
5.1.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.489.780	93.180.552	86%	86%
5.1.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.469.340	71.358.070	97%	97%
5.1.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	25.000.000	24.228.229	97%	97%
5.1.02	PROGRAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	356.608.000	348.799.995	98%	98%
5.1.02	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	356.608.000	348.799.995	98%	98%
5.1.02.2.01.02	Sub Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	28.530.000	23.145.245	81%	81%
5.1.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	65.685.000	65.570.000	100%	100%
5.1.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	123.665.000	123.006.750	99%	99%
5.1.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	138.728.000	137.078.000	99%	99%
5.1,02	PROGRAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.141.745.500	1.082.751.962	95%	95%

5.1.02.2.03.01	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.141.745.500	1.082.751.962	95%	95%
5.1.02.2.03.01	Sub Keg. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1.141.745.500	1.082.751.962	95%	95%
5.1.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	172.723.500	169.739.500	98%	98%
5.1.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	172.723.500	169.739.500	98%	98%
5.1.03.2.01.06	Sub Kegiatan Asistensi Penusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	172.723.500	169.739.500	98%	98%
5.1.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	370.918.000	364.639.750	98%	98%
5.1.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	370.918.000	364.639.750	98%	98%
5.1.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.318.000	6.288.000	100%	100%
5.1.03.2.02.04	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	184.600.000	182.165.480	99%	99%
5.1.03.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180.000.000	176.186.270	98%	98%
5.5.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100.000.000	98.633.605	99%	99%
5.5.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.000.000	98.633.605	99%	99%
5.5.02.2.04.03	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100.000.000	98.633.605	99%	99%
Total				94 %	94%

a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah selama 5 tahun memberikan dukungan yang signifikan dalam perencanaan daerah dengan ketersediaan beberapa dokumen strategis baik bersifat sektor maupun secara makro perencanaan daerah serta dukungan pelaksanaan tahapan dan prinsip perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pembangunan dan ditahun pertama RENSTRA dalam tuntutan akuntabel, terbuka dan transparansi sistem perencanaan daerah dilaksanakan dengan aplikasi SIPD yang telah direkomendasikan oleh oleh Kementerian dalam Negeri republik Indonesia dalam menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik.

- b. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mendukung sebagai unsur penunjang daerah.

Dampak perubahan struktur dan tata laksana badan perencanaan dirasakan belum optimal dengan berkurangnya beberapa fungsi yaitu bidang perencanaan sarana prasarana, bidang pengendalian dan evaluasi jika acuan pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 pasca implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2025 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan cakupan analisa kinerja pelayanan

dan target capaian kinerja secara garis besar seperti termuat pada tabel berikut :

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
5.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.1.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.1.01.2.02.01	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5.1.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.1.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.1.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.1.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.1.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.1.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.1.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.1.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.1.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.1.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor
5.1.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.1.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5.1.02.2.01.0002	Sub Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
5.1.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
5.1.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

5.1.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
5.1.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.1.02.2.03.0001	Sub Keg. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
5.1.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.1.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.1.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
5.1.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5.1.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5.1.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5.1.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPD)
5.1.03.2.01.0006	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.1.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.1.03.2.01.0008	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5.1.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5.1.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.1.03.2.02.0002	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5.1.03.2.02.0003	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5.1.03.2.02.0004	Sub kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
5.1.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.1.03.2.02.0006	Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

5.1.03.2.02.0007	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
5.1.03.2.02.0008	Sub kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
5.1.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.1.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.1.03.2.03.0003	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
5.1.03.2.03.0004	Sub kegiatan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5.1.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.5.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5.05.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
5.05.02.2.04.0001	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Struktur tugas dan fungsi badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah memiliki cakupan pelayanan yang luas sebagai unsur penunjang perencanaan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan pada masing-masing perangkat daerah dalam menjaga konsistensi arah kebijakan perencanaan secara berjenjang baik nasional dan

provinsi serta mengkonsolidasikan berbagai aspirasi pemangku kepentingan dalam perencanaan teknokratik daerah.

Dengan keadaan dan tuntutan fungsi penunjang urusan perencanaan daerah sebagaimana diatas perlu disadari bahwa ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian seperti :

- a. Pembenahan struktur pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan acuan pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Penunjang Daerah;
- b. Peningkatan kualitas SDM perencana yang berkapasitas, kompeten dan profesional dalam perencanaan dengan lisensi sertifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Keterbatasan jumlah dan masih lowongnya jabatan pelaksana pada bidang sosial dan budaya;
- d. Belum optimalnya ketersediaan data sebagai akibat dukungan data capaian kinerja lintas sektor belum memadai ketersediaannya dalam tahapan siklus perencanaan berbasis data;
- e. Fasilitas penunjang baik peralatan maupun dukungan pendanaan yang belum memadai.

Persoalan-persoalan tersebut diatas dalam tuntutan optimalisasi fungsi penunjang perencanaan secara sadar dapat berpengaruh pada pencapaian visi misi daerah serta capaian program prioritas nasional dalam implemenasi standar pelayanan minimal, serta menterjemahkan dan mengukur capaian target tujuan pembangunan berkelanjutan.

Strategisnya kedudukan Badan Perencana sebagai unsur penunjang pada beberapa tahun kedepan duharapkan dengan capaian target kinerja yang signifikan pada beberapa hal berikut :

- ❖ Strategisnya koordinasi perencanaan dalam memadukan perencanaan teknokratik, aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan tetap pada koridor arah kebijakan nasional dan provinsi;
- ❖ Meningkatnya harapan masyarakat dalam perbaikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai pada pemanfaatan hasil pembangunan;
- ❖ Perubahan arah kebijakan perencanaan dari **money follow function** kearah kebijakan **money follow program priority**;
- ❖ Prosentasi kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten / kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ❖ Pembenahan besarnya proporsi belanja public yang dirasakan langsung masyarakat dari pada belanja operasional rutinitas dan belanja aparatur;
- ❖ Perencanaan dengan pendekatan **Tematik** (fokus pada program prioritas kegiatan utama dan kegiatan pendukung), **Holistik** (pendekatan menyeluruh dan komprehensif hulu hilir) , **Intergrasi** (siapa berbuat apa dan integrasi pendanaan) dan **Spasial** (keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan terintegrasi)
- ❖ Tuntutan sinergitas dokumen perencanaan desa dan dokumen perencanaan kabupaten.

- ❖ Tuntutan transparansi dan keterbukaan dalam optimalisasi penerapan perencanaan, penganggaran dan pengendalian, serta pengawasan pembangunan berbasis IPTEK
- ❖ Keterpaduan dokumen perencanaan secara berjenjang baik RPJMD dan RPJMDesa, RKPD dan RKPDesa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog/Keg	Lokasi	IK	Target Capaian	Pagu Indikatif	Prog/Keg	Lokasi	IK	Target Capaian	Pagu Indikatif	

DISESUAIKAN DENGAN RANWAL RKPD DAN RANCANGAN AKHIR RKPD SAAT VERIFIKASI RENJA OPD SAMPAI PADA PENETAPAN RKPD DAN RENJA OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat menempatkan bahwa strategisnya masyarakat sebagai pelaku dan sasaran pembangunan sehingga dalam tahapan dan mekanisme perencanaan dapat dipadukan antara perencanaan partisipatif, perencanaan teknokrat, (*Bottom up / Top Down*) serta perencanaan politik. Dengan demikian maka perencanaan pembangunan dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam tuntutan tugas dan fungsi Badan Perencanaan merupakan acuan dalam perumusan arah kebijakan teknis penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah dalam mengakomodir program dan kegiatan yang relevan dengan prioritas daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah adalah :

Tujuan

Sebagaimana rumusan tujuan pencapaian Daerah **“Meningkatkan kapasitas aparatur dan tatakelola pemerintahan yang akutabel dan profesional serta berjiwa melayani untuk meningkatkan pelayanan publik”** maka tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah **“ Meningkatkan Kualitas Kinerja Perencanaan berbasis *e- planing*, Pengendalian, Evaluasi, Ketersediaan Data, SIPD, Penelitian dan Pengembangan, Inovasi dalam perumusan strategi, dan arah kebijakan program prioritas, dan kegiatan yang terukur dan tepat sasaran”**.

Sasaran

Adapun sasaran pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Sumba Tengah adalah **“Mewujudkan birokrasi yang profesional untuk meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akutabel, transparan serta partisipatif”**. Sedangkan sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah **“Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah.”**

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba
Tengah Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2021	Target			Ket
1	2	3	4	5	6	7	8			8
	Meningkatkan kapasitas aparatur dan tatakelola pemerintahan yang akutabel dan profesional serta berjiwa melayani untuk meningkatkan pelayanan publik	Indeks Kualitas Perencanaan	Mewujudkan birokrasi yang profesional untuk meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akutabel, transparan serta partisipatif	Presentase Program Perangkat Daerah selaras dengan RPD (%)	%	93,67	2024 95,00	2025 97,50	2026 100	
				Cakupan penyusunan dokumen perencanaanBidang Pemerintahan, dan pembangunanmanusia (%)	%	19,23	37,56	46,96	58,69	
				Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang PerekonomiandanSDA (%)	%	30,77	46,80	53,82	61,89	
				Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur & kewilayahan (%)	%	19,23	37,56	46,95	58,69	
				Dokumen Penelitiandan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan (%)		30,00	58,59	73,24	91,55	
				Persentase Perangkat Daerah yang melakukan inovasi (%)		18,18	35,51	44,38	55,48	

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan tugas dan fungsi badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten sumba tengah dan relevansinya dengan penyusunan dokumen renja tahun 2024, maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan Renja

- 1) Meningkatkan perumusan dukungan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Meningkatkan perumusan dukungan teknis kajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- 3) Meningkatkan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

b. Sasaran Renja

- 1) Tersedianya kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Tersedianya kebijakan teknis lingkup urusan pemerintahan daerah;
- 3) Meningkatnya pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- 5) Kaitanya dengan RPD dan tugas fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana diatas dan mengacu pada RPD Kabupaten Sumba Tengah 2024-2026 merumuskan Visi “Mewujudkan Sumba Tengah Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing” dan dengan beberapa misi “Meningkatkan

kapasitas aparatur dan tatakelola pemerintahan yang akutabel dan profesional serta berjiwa melayani untuk meningkatkan pelayanan publik seperti pada tabel berikut:

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
							2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kapasitas aparatur dan tatakelola pemerintahan yang akutabel dan profesional serta berjiwa melayani untuk meningkatkan pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan terukur dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan	Mewujudkan birokrasi yang profesional untuk meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akutabel, transparan serta partisipatif	Presentase Program Perangkat Daerah selaras dengan RPD (%)	%	93,67	95,00	97,50	100	
				Cakupan penyusunan dokumen perencanaanBidang Pemerintahan, dan pembangunanmanusia (%)	%	19,23	37,56	46,96	58,69	
				Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (%)	%	30,77	46,80	53,82	61,89	
				Cakupan penyusunan dokumen perencanaanBidang Infrastruktur & kewilayahan (%)	%	19,23	37,56	46,95	58,69	
				Dokumen Penelitiandan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan (%)	%	30,00	58,59	73,24	91,55	
				Persentase PerangkatDaerah yang melakukan inovasi (%)	%	18,18	35,51	44,38	55,48	

3.2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta target capaian kinerja maka ada 5 program, 11 kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 2) Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Kegiatan administrasi keuangan
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN
 - 3) Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c. Kegiatan administrasi umum
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 3) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 6) Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyediaan jasa pelayanan urusan kantor.
- e. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

-
- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajakkendaraan perorangan dinas kendaraan dinas;
 - 2) Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
 - 3) Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunanlainnya.

II. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunandaerah dengan dokumen kebijakan lainnya.
- 2) Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD
- 3) Pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota
- 4) Penyiapan bahan koordinasi musrenbang Kecamatan
- 5) Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

b. Analisi data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah

- 1) Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD

III. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

a. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

- 1) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan
- 3) Koordinasi penyusunan dokumen dan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- 4) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia.

b. Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA(sumber daya air)

- 1) Perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian(RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
- 2) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian.
- 4) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian.
- 5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
- 6) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah

-
- bidang SDA.
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA.
 - 8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA.
- c. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan
- 1) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
 - 2) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang insfastruktur.
 - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur.
 - 4) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur.
 - 5) Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

IV. Program penelitian dan pengembangan daerah

- a. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
 - 1) Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan.

-
- 2) Penelitian dan pengembangan kesehatan
 - b. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi ekonomi dan pembangunan
 - 1) Penelitian dan pengembangan pertanian perkebunan dan pangan
 - 2) Penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.
 - c. Pengembangan inovasi dan teknologi
 - 1) Disminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan deskripsi Bab I sampai dengan Bab III diatas maka rumusan rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip money follow program priority berdasarkan tuntutan peraturan maka dapat disajikan rencana program kegiatan dan pendanaan (*terlampir*).

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai dokumen operasional penjabaran tugas dan fungsi penunjang perencanaan daerah dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD untuk “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terukur dalam perencanaan pembangunan daerah yang handal dan selaras.

Dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran dengan tetap memperhatikan prioritas capaian target kinerja pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah dalam urusan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengawasan, pelaporan serta pencapaian tujuan pembangunan dalam pemanfaatan secara berkelanjutan.

Kiranya Rencana Kerja Tahun 2025 dapat menjadi pedoman dan acuan bagi aparatur internal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara untuk mengedepankan semangat pelayanan yang akuntabel, professional dan memiliki etos kerja tinggi.

Waibakul, Pebruari 2024



No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu 2025	Sumber Dana	Prakiraan Maju	Keterangan		Catatan
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					SKPD	Jenis Keg	
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										7.638.399.679,00		8.367.831.862,95			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										7.638.399.679,00		8.367.831.862,95			
	5.01	PERENCANAAN										6.994.363.679,00		7.344.081.862,95			
1,	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-					2.835.363.679,00	APBD II	2.977.131.862,95		-	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan, 14 Bulan dan 1 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Transparan dan Akuntabel	12 Bulan, 14 Bulan dan 1 Laporan	Mewujudkan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Transparan dan Akuntabel	12 Bulan, 14 Bulan dan 1 Laporan	1.983.154.079,00		2.082.311.782,95			
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Sumba Tengah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.851.714.639,00		1.944.300.370,95			

	5.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Sumba Tengah	Terpenuhi nya Penyediaa n Administra si Pelaksana an Tugas ASN	12 Bulan (Honor bendaha ra barang dan pengelu aran)	Tersedianya dana untuk administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan (Honor bendaha ra barang dan pengelu aran)	Terwujudnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan (Honor bendahara barang dan pengeluaran)	122.269.440,00		128.382.912,00			
	5.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Sumba Tengah	Terpenuhi nya Permintaan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	2 Laporan (CALK dan Laporan Barang Milik Daerah)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	2 Laporan (CALK dan Laporan Barang Milik Daerah)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	2 Laporan (CALK dan Laporan Barang Milik Daerah)	9.170.000,00		9.628.500,00			
	5.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan, perjalanan dinas luar dan dalam daera, peralatan kantor, peralatan kerja	Terlaksananya pelayanan administrasi Umum	12 bulan, perjalanan dinas luar dan dalam daera, peralatan kantor peralatan kerja	Mewujudkan Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan, perjalanan dinas luar dan dalam daera, peralatan kantor peralatan kerja	169.586.000,00		178.065.300,00			
	5.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Sumba Tengah	Terpenuhi nya Peralatan Rumah Tangga	Peralatan dapur selama 1 tahun	Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan dapur selama 1 tahun	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Peralatan dapur selama 1 tahun	5.086.000,00		5.340.300,00			
	5.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Sumba Tengah	Terpenuhi nya Bahan Logistik Kantor	100	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100	4.500.000,00		4.725.000,00			

	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Sumba Tengah	Terpenuhi nya Penyediaa n Barang Cetak dan Penggandaan	5 Laporan (LAKIP, LPPD, LKPj, CALK, Laporan) dan 4 Dokume n (RKA, PRKA, DPA dan DPPA)	Terlaksanan ya Percetakan dan Penggandaan Dokumen dan Laporan	5 Laporan (LAKIP, LPPD, LKPj, CALK, Laporan) dan 4 Dokume n (RKA, PRKA, DPA dan DPPA)	Terwujudnya Laporan dan Dokumen	5 Laporan (LAKIP, LPPD, LKPj, CALK, Laporan) dan 4 Dokumen (RKA, PRKA, DPA dan DPPA)	10.000.000,00		10.500.000,00			
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksana nya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sedaratan Pulau Sumba dan Luar Pulau Sumba	Tersedianya anggaran untuk Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sedaratan Pulau Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sedaratan Pulau Sumba dan Luar Pulau Sumba	150.000.000,00		157.500.000,00			
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-			337.623.600,00		354.504.780,00			
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sumba Tengah	Terpenuhi nya Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Laptop, Printer, infokus,</i>	Terlaksanan ya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Laptop, Printer, infokus,</i>	Terwujudnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Laptop, Printer, infokus,</i>	45.000.000,00		47.250.000,00			
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sumba Tengah	Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	146.311.800,00		153.627.390,00			
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Sumba Tengah	Terlaksana nya Jasa Komunikas i, Air dan Listrik	12 Bulan	Tersedianya dana utk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Terealisasinya biaya listrik, air dan internet	12 Bulan	24.000.000,00		25.200.000,00			

	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sumba Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	122.311.800,00		128.427.390,00			
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Roda 2 unit dan Roda 14 unit, dan peralatan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk Menunjang Pelayanan Perkantoran	Kendaraan Roda 2 unit dan Roda 14 unit, dan peralatan mesin lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang memadai	Kendaraan Roda 2 unit dan Roda 14 unit, dan peralatan mesin lainnya	345.000.000,00		362.250.000,00			
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Sumba Tengah	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Kendaraan Roda 2 unit dan Roda 14 unit	Terlaksananya Dana untuk Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Kendaraan Roda 2 unit dan Roda 14 unit	Tersedianya Kendaraan Operasional yang baik untuk menunjang pelayanan perkantoran	Kendaraan Roda 2 unit dan Roda 14 unit	270.000.000,00		283.500.000,00			
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sumba Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, Printer,	Tersedianya anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, Printer,	Terwujudnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, Printer,	75.000.000,00		78.750.000,00			
2,	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							-			1.261.000.000,00	APBD II	1.324.050.000,00			
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	Terwujudnya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		361.000.000,00		379.050.000,00			

	5.01.02. 2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	Terwujudnya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Dokumen	50.000.00 0,00		52.500.000, 00			
	5.01.02. 2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Sumba Tengah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita acara	Tersedianya anggaran untuk Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita acara	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita acara	65.000.00 0,00		68.250.000, 00			
	5.01.02. 2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Sumba Tengah	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita acara	Tersedianya anggaran untuk Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita acara	Terwujudnya Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita acara	106.000.0 00,00		111.300.000 ,00			
	5.01.02. 2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			Sumba Tengah	Terlaksananya Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	6 kecamatan, dan akomodir usul dari desa	Tersedianya anggaran untuk Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	6 kecamatan, dan akomodir usul dari desa	Terwujudnya Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	6 kecamatan, dan akomodir usul dari desa	140.000.0 00,00		147.000.000 ,00			

	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				meningkatkan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Terwujudnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		900.000.000,00		945.000.000,00			
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen RKPD Murni, RKPD Perubahan, RPJMD	Tersedianya anggaran untuk Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen RKPD Murni, RKPD Perubahan, RPJMD	Terwujudnya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen RKPD Murni, RKPD Perubahan, RPJMD	900.000.000,00		945.000.000,00			
3,	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							-			2.898.000.000,00	APBD II	3.042.900.000,00			
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		750.000.000,00		787.500.000,00			

	5.01.03. 2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Tersedianya anggaran untuk Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000,00		157.500.000,00			
	5.01.03. 2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Sumba Tengah	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Renja PD murni dan Perubahan	Tersedianya anggaran Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Renja PD murni dan Perubahan	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Renja PD murni dan Perubahan	150.000.000,00		157.500.000,00			
	5.01.03. 2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Sumba Tengah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	Tersedianya anggaran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	150.000.000,00		157.500.000,00			

	5.01.03. 2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Tersedianya anggaran Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD			0,00			
	5.01.03. 2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Sumba Tengah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Tersedianya anggar Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			0,00			
	5.01.03. 2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Sumba Tengah	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Renja PD murni dan Perubahan	Tersedianya anggaran Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Renja PD murni dan Perubahan	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Renja PD murni dan Perubahan	150.000.000,00		157.500.000,00			

						nan Manusia											
	5.01.03. 2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Sumba Tengah	Terlaksana nya monitoring dan Evaluasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pembangu nan Manusia	1 laporan	Tersedianya anggaran Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pembangun an Manusia	1 laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	1 laporan	150.000.0 00,00		157.500.000 ,00			
	5.01.03. 2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksana nya Koordinasi Pelaksana an Sinergitas dan Harmonisa si Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Pembangu nan Manusia	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Tersedianya anggaran Koordinasi Pelaksanaa n Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Pembangun an Manusia	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Terwujunya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	150.000.0 00,00		157.500.000 ,00			

	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		1.508.000.000,00		1.583.400.000,00			
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Tersedianya anggaran Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	468.000.000,00		491.400.000,00			
	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Sumba Tengah	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Renja PD murni dan Perubahan	Tersedianya anggaran Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Renja PD murni dan Perubahan	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Renja PD murni dan Perubahan	150.000.000,00		157.500.000,00			

	5.01.03. 2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Sumba Tengah	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	Tersedianya anggaran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	150.000.000,00		157.500.000,00			
	5.01.03. 2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Tersedianya anggaran Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	110.000.000,00		115.500.000,00			
	5.01.03. 2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksanya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan	1 Dokumen	Tersedianya anggaran Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000		157.500.000,00			

						RKPD)											
	5.01.03. 2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laksana		Sumba Tengah	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Renja PD murni dan Perubahan</i>	Tersedianya anggaran Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Renja PD murni dan Perubahan</i>	Terwujudnya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Renja PD murni dan Perubahan</i>	110.000.000,00		115.500.000,00			
	5.01.03. 2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Sumba Tengah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>1 laporan</i>	Tersedianya anggaran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>1 laporan</i>	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>1 laporan</i>	150.000.000,00		157.500.000,00			

	5.01.03. 2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Tersedianya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	220.000.000,00		231.000.000,00			
	5.01.03. 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			Sumba Tengah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Tersedianya anggaran Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		640.000.000,00		672.000.000,00			
	5.01.03. 2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Tersedianya anggaran Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	150.000.000,00		157.500.000,00			

	5.01.03. 2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Sumba Tengah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	Tersedianya anggaran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	Terwujudnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	150.000.000,00		157.500.000,00			
	5.01.03. 2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Tersedianya anggaran Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	Renja PD, RKA, RKPD, Rantek, RPJMD, RPJPD	100.000.000,00		105.000.000,00			
	5.01.03. 2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Sumba Tengah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD	1 Dokumen	Tersedianya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	140.000.000		147.000.000,00			

						dan RKPD)											
	5.01.03. 2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksana nya Koordinasi Penyusun an Dokumen Perencana an Pembangu nan Daerah Bidang Kewilayah an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokume n	Tersedianya anggaran Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokume n	Terwujudnya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	100.000.0 00,00		105.000.000 ,00			
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										644.036.0 00,00		676.237.800 ,00			
1,	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							-			644.036.0 00,00		676.237.800 ,00			
	5.05.02. 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Meningkn ya Penelitian dan Pengemb angan Bidang Penyelen ggaraan Pemerinta han dan Pengkajia		Tersediany a anggaran Penelitian dan Pengemban gan Bidang Penyelengg araan Pemerintah an dan Pengkajian Peraturan	-	Terwujudnya Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelengga raan Pemerintaha n dan Pengkajian Peraturan		200.036.0 00,00		210.037.800 ,00			

						n Peraturan											
	5.05.02. 2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			Sumba Tengah	Terlaksanya a Fasilitasi, Pelaksana an dan Evaluasi Penelitian dan Pengemba ngan Bidang Pemerinta han Umum	1 Dokume n	Tersedianya anggaran Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Pemerintaha n Umum	1 Dokume n	Terwujudnya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	200.036.0 00,00		210.037.800 ,00			
	5.05.02. 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		144.000.0 00,00		151.200.000 ,00			
	5.05.02. 2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Sumba Tengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokume n	Tersedianya anggaran Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokume n	Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	144.000.0 00,00		151.200.000 ,00			
	5.05.02. 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan		Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	Terwujudnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi		100.000.0 00,00		105.000.000 ,00			

						Teknologi											
	5.05.02. 2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Sumba Tengah	Terlaksana nya Penelitian, Pengemba ngan, dan Perekayas aan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokume n, Lomba Inovasi Daerah	Tersedianya anggaran Penelitian, Pengemban gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokume n, Lomba Inovasi Daerah	Terwujudnya Penelitian, Pengembang an, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen, Lomba Inovasi Daerah	100.000.0 00,00		105.000.000 ,00			
	5.50.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH										200.000.0 00,00		210.000.000 ,00			
	5.50.03. 20.1	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				Meningkny a Penelitian, Pengemba ngan, Pengkajian , dan Penerapan		Terlaksanan ya Penelitian, Pengemban gan, Pengkajian, dan Penerapan		Terwujudnya Penelitian, Pengembang an, Pengkajian, dan Penerapan		200.000.0 00,00		210.000.000 ,00			
	5.50.03. 20.1.000 5	Bimbingan teknisdan supervisi dibidang penelitian,pengembang an,pengkajian, danpenerapan, kerjasamapembanguna n ilmupengetahuan danteknologi, sertakemitraanpeneliti an,pengembangan,peng kajian, danpenerapan			Sumba Tengah, Daratan Sumba dan Luar Pulau Sumba	Terlaksana nya Bimbingan teknisdan supervisi dibidang penelitian, pengemba ngan,peng kajian, danpenera pan, kerjasama pembangu nan ilmupenget ahuan danteknolo gi, sertakemitr aanpeneliti an,penge mbangan,	Pelatiha n dan Bimtek ASN	Tersedianya anggaran Bimbingan teknisdan supervisi dibidang penelitian,pe ngembang an,pengkaji an, danpenerap an, kerjasamap embanguna n ilmupengeta huan danteknologi , sertakemitra anpenelitian, pengemban gan,pengkaji	Pelatiha n dan Bimtek ASN	Terwujudnya Bimbingan teknisdan supervisi dibidang penelitian,pen gembangan,p engkajian, danpenerapan , kerjasamape mbangunan ilmupengetah uan danteknologi, sertakemitraa npenelitian,pe ngembangan, pengkajian, danpenerapan	Pelatihan dan Bimtek ASN	200.000.0 00,00		210.000.000 ,00			

						pengkajian , danpenera pan		an, danpenerap an								
	J U M L A H										7.638.399. 679,00		8.020.319.6 62,95			

